

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum Pasien, Dokter dan Rumah Sakit

1. Perjanjian Terapeutik

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹

Perjanjian Terapeutik, adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian Terapeutik harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap. Pihak penerima pelayanan medis adalah pasien, sedangkan pihak pemberi pelayanan medis adalah dokter dan tenaga kesehatan.²

Perjanjian Terapeutik memiliki objek yakni pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Sebab yang halal yang terdapat dalam Perjanjian Terapeutik adalah dimana tujuan daripada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas

¹ Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hal.36.

² Cecep Triwibowo, Op. Cit., hal. 64

kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).

Pembahasan berkenaan dengan persyaratan sah dari suatu perjanjian terapeutik ini dilandaskan ke dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang menjelaskan bahwa persyaratan sah dari suatu perjanjian terapeutik ini memerlukan empat persyaratan yang wajib untuk terpenuhi, diantaranya ialah sebagaimana di bawah ini:³

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*toestemming van degene die zich verbindt*).

Kesepakatan yang apa adanya secara yuridis didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang tidak terdapat unsur penipuan, kekhilafan ataupun paksaan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*).

Kecakapan secara yuridis didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menyusun perikatan ialah sebagai suatu keterampilan atau kemampuan dari seorang individu guna melaksanakan pengikatan diri, sebab hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dilarang berdasarkan pada

³ Salim H.S., 2015, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 33.

undang-undang. Hal semacam ini dilandaskan pada pasal 1330 dan juga pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Merujuk pada pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tiap seorang individu ialah seseorang yang memiliki kecakapan guna melaksanakan pembuatan suatu perikatan, bilamana oleh undang-undang dikatakan tidak memiliki kecakapan. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa orang atau seorang individu yang disebutkan bahwa tidak memiliki kecakapan ialah seorang individu yang masih belum dewasa ialah mereka yang berada pada bawah pengampuan ataupun seorang wanita, dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang serta semua pihak yang pada umumnya diperuntukkan di dalam undang-undang yang sudah dilarang untuk dibuatkan suatu perjanjian tertentu.

Perjanjian dari terapeutik serta pihak yang menerima layanan medis terdiri oleh orang dewasa yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu tindakan, orang dewasa yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan suatu tindakan, yang membutuhkan persetujuan dari pengampu serta anak yang berusia dini yang membutuhkan suatu persetujuan dari wali atau orang tuanya.

Batasan dinyatakan seorang individu dinyatakan dewasa ditetapkan di dalam pasal 8 ayat (2) berkenaan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989, dilanjutkan dengan Surat Keputusan dari SK Dirjen Yan.Med 21 April 1999 yang

menjelaskan bahwa pasien yang dinyatakan dewasa seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) ialah seorang pasien yang sudah memiliki umur 21 tahun atau seorang pasien yang sudah menikah.⁴

c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)⁵.

Objek dari perjanjian terapeutik didefinisikan sebagai suatu usaha untuk melaksanakan penyembuhan. Usaha untuk menyembuhkan didapatkan berdasarkan pada pencapaian dari proses penyembuhan, tidak boleh atau tidak bisa dijamin oleh pihak dokter. Pelaksanaan dari usaha untuk menyembuhkan tersebut tidak hanya bergantung kepada kesungguhan dan keahlian dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tetapi banyak faktor lain yang ikut berperan, misalnya daya tahan pasien terhadap obat tertentu, tingkat keparahan penyakit dan juga peran pasien dalam melaksanakan perintah dokter demi kepentingan pasien itu sendiri.

d. Suatu sebab yang sah (*geoorloofde oorzaak*)⁶

Di dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa sebuah sebab ialah terlarang, bilamana undang-undang melarang atau bilamana bertentangan pada ketertiban umum ataupun kesusilaan baik, oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan sebab sah ialah suatu sebab yang undang-undang tidak melarang, ketertiban umum ataupun

⁴ Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematisasi Implementasi Informed Consent (Telaah Pelak Sanaan Permenkes. No. 585/MenKes/Per/X/1989)*, FH UNS, Surakarta, 1999, hlm. 49-50.

⁵ Salim H.S, Op. Cit., hlm. 33.

⁶ Ibid., hlm. 33.

kesusilaan. Jalinan keterkaitan hubungan antara pasien dan juga dokter yang berkenaan dengan layanan medis dipergunakan sebagai suatu obyek yang dijanjikan, kedua belah pihak baik pihak yang menerima layanan medis atau dokter menginginkan sebuah hal yang halal, sebab pihak dokter dalam menyembuhkan dan menolong pada pihak yang mendapatkan layanan medis tersebut mempergunakan wawasan dan juga ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan, pasien juga harus bertindak yang halal, yakni dengan mengharap kesehatan, dengan demikian syarat-syarat yang ada pada Pasal 1320 KUHP data telah bisa dilaksanakan pemenuhan.

Transaksi terapeutik didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang di dalamnya ada usaha untuk melaksanakan penyelenggaraan praktik dokter yang berbentuk memberikan layanan kesehatan yang dilandaskan terhadap keterampilan dan juga keahlian yang ada pada pihak dokter. Definisi semacam ini juga bisa dihasilkan simpulan bahwa ada empat persyaratan sah dari perjanjian terapeutik sebagaimana di bawah ini:

- a. Terdapatnya suatu kesepakatan yang terjalin antara pihak yang mendapatkan layanan medis dengan pihak dokter bahwa kedua belah pihak sama-sama saling terikat (*toestemming van degene die zich verbinden*).

- b. Kecakapan yang ada pada semua pihak guna melaksanakan pembuatan suatu perjanjian tertentu (*bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*).
- c. Objek perjanjian ataupun sebuah permasalahan tertentu yang berbentuk usaha untuk melaksanakan penyembuhan (*een bepaald onderwerp*).
- d. Sebuah sebab yang sah (*geoorloofde oorzaak*).

2. Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien

Dokter didefinisikan sebagai bagian yang mendasar yang memberikan layanan kesehatan pada masyarakat memainkan peran signifikan, sebab hal semacam ini memiliki keterkaitan hubungan yang langsung terhadap proses memberikan mutu dan layanan kesehatan. Minimnya rasa percaya pada dokter dari masyarakat dengan terdapatnya banyak tuntutan hukum yang diberikan oleh masyarakat saat ini dianggap sebagai suatu kegagalan dalam menyediakan layanan kesembuhan yang disajikan atau diberikan oleh pihak dokter. Hal yang berlainan, bilamana tindakan layanan medis yang dilaksanakan bisa berhasil maka akan dipersepsikan secara berlebihan, walaupun dokter dengan wawasan dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada hanya berusaha guna melaksanakan penyembuhan serta kegagalan dari penerapan ilmu kedokteran tidak serta merta didefinisikan sebagai kegagalan dalam melaksanakan suatu tindakan.

Definisi dari dokter termaktub pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, ialah sebagaimana berikut:

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kompetensi, ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang ada pada dokter dengan melewati serangkaian proses pelatihan dan juga pendidikan didefinisikan dasar utama untuk seorang tenaga medis atau dokter guna bisa melaksanakan tindakan medis pada pihak pasien. Dokter yang memiliki bekal pengetahuan dan juga ilmu tersebut memiliki ciri khas tertentu. Pengetahuan dan juga ilmu tertentu tersebut dapat ditinjau berdasarkan pembenaran yang diberi oleh hukum, yakni diperbolehkan untuk melaksanakan tindakan medis pada tubuh dari pihak pasien dalam usaha untuk menaikkan dan juga memelihara kesehatan pihak pasien.

Terjalannya hubungan antara pihak dokter dengan pihak pasien didefinisikan sebagai hubungan saling kepercayaan. Kepercayaan didefinisikan sebagai salah satu dari beberapa landasan utama pihak pasien melaksanakan hubungan pada pihak dokter, yaitu bahwa pihak dokter itu mampu dan dapat membantuk untuk melaksanakan proses penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh pihak pasien itu sendiri. Seorang pasien pada dasarnya tidak akan bersedia mengunjungi pihak dokter yang mana bahwa pasien tersebut tidak memiliki kepercayaan pada dokter berkenan dengan kemampuan atau kapasitas yang dipunyai oleh dokter dalam melaksanakan tindakan medis atas penyakit yang dideritanya. Hal semacam ini dikarenakan bahwa pihak pasien ialah sebagai seorang yang

awam berkenaan dengan ilmu kesehatan yang tidak memahami secara detail tentang penyakit yang dialaminya, dengan demikian memerlukan pihak lain yang bisa dipercaya bahwa pihak tersebut dapat menyembuhkan atau mengobati penyakit yang diderita oleh pihak pasien tersebut. Kepercayaan yang dimiliki oleh pihak pasien pada kemampuan dari dokter tersebutlah yang menyebabkan posisi dari pihak dokter tersebut lebih tinggi dibandingkan pada kedudukan dari pasien.⁷

Jalinan ketekaitan hubungan antara pihak pasien dan pihak dokter ada dua jenis pola, diantaranya ialah pola hubungan vertikal paternalistik dan pola hubungan horizontal yang kontraktual.⁸ Hubungan vertikal didefinisikan sebagai jalinan hubungan antara pihak dokter yang berpredikat sebagai pihak yang memberikan layanan kesehatan tidak sederajat dibandingkan dengan kedudukan dari pihak pasien yang berpredikan sebagai penerima atau pengguna layanan jasa kesehatan, sementara itu dalam pola hubungan horizontal yang kontraktual didefinisikan sebagai suatu kedudukan antara pihak yang menerima layanan jasa kesehatan dan juga pihak yang memberikan layanan jasa kesehatan yang memiliki kedudukan sederajat.⁹

Menurut Bahder Johan Nasution, hubungan dokter dengan pasien

⁷ Husein Kerbala, 1993, *Segi-Segi dan Yuridis Informen Consent*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 37.

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 36.

⁹ Ibid., hlm. 36.

merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹⁰ Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda, kekhususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini melakukan upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien.

Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Soejono Soekanto menjelaskan bahwa hubungan yang berlangsung antara pihak pasien dengan pihak dokter pada umumnya ialah keterkaitan hubungan keperdataan, yang mana bahwa pihak pasien berkunjung pada dokter supaya meminta bantuan menyembuhkan penyakit yang diderita, sedangkan pihak dokter berjanji memberikan usaha pengobatan dan juga penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Hubungan keperdataan didefinisikan sebagai hubungan hukum yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ada pada kedudukan yang sederajat.¹¹

Merujuk pada hukum perdata, hubungannprofesional yang berlangsung antara pihak pasien dengan pihak dokter bisa berlangsung disebabkan oleh dua hal, yakni:¹²

- a. Berdasarkan perjanjian (*ius contractu*) yang berbentuk kontrak terapeutik secara sukarela antara dokter dengan pasien berdasarkan

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 11.

¹¹ Soejono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan*, Jakarta, Ind-Hill-Co, hlm. 4 .

¹² Ibid., hlm. 5.

kehendak bebas. Tuntutan dapat dilakukan bila terjadi "wanprestasi", yakni pengingkaran terhadap hal yang diperjanjikan. Dasar tuntutan ialah salah melaksanakan, tidak, terlambat, serta melaksanakan suatu tindakan yang tidak diperkenankan berdasarkan perjanjian.

- b. Berdasarkan hukum (*ius delicto*) didefinisikan sebagai suatu prinsip berkenaan dengan pihak mana yang merugikan pihak yang lain yang diwajibkan untuk memberi ganti terhadap kerugian yang dialami pihak yang lainnya.

3. Hubungan Hukum Pasien dan Rumah Sakit

Sebagaimana dalam Undang-undang No 44 Tahun 2009 berkenaan dengan rumah sakit mengungkapkan bahwa rumah sakit didefinisikan sebagai suatu institusi layanan kesehatan yang melangsungkan operasional layanan kesehatan perorangan dengan paripurna yang memberikan layanan gawat darurat, rawat inap, dan juga rawat jalan.

Hubungan yang terjalin antara pihak rumah sakit dan juga pihak pasien secara umum dilandaskan terhadap layanan faktor "itikad yang baik" (*good faith, goedertrouw*) dan unsur "kepercayaan" (*vetrouwen, trust*). Kedudukan dari rumah sakit ialah pihak yang wajib memberi jaminan pelaksanaan (prestasi), sedangkan pihak dokter memiliki fungsi sebagai pekerja (sub-ordinaten dari rumah sakit) yang memiliki tugas guna melangsungkan kewajiban yang dimiliki oleh pihak rumah sakit, atau bahwa kedudukan dari rumah sakit tersebut ialah sebagai pihak atasan, sedangkan pihak dokter ialah sebagai seorang agen. Sementara itu,

kedudukan dari pasien ialah pihak yang memiliki kewajiban untuk menyediakan kontra-prestasi.¹³

Hubungan yang berlangsung antara pihak rumah sakit dengan pihak pasien secara hukum perdata ialah sebagai suatu hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual yang berlangsung antara pihak rumah sakit dengan pihak pasien ialah sebagaimana di bawah ini:¹⁴

a. Perjanjian Perawatan

Kesepakatan yang terjalin antara pihak pasien dengan pihak rumah sakit ialah bahwa pihak rumah sakit tersebut memberikan layanan sedia tenaga perawat dan juga kamar perawatan yang hendak dipergunakan sebagai melayani perawatan pada pihak pasien yang ingin mendapatkan layanan kesehatan.

b. Perjanjian Pelayanan Medis

Kesepakatan yang terjalin antara pihak pasien dengan pihak rumah sakit bahwa pihak rumah sakit tersebut akan berusaha secara optimal guna melaksanakan penyembuhan pada pihak pasien dengan melewati tindakan medis.

Merujuk pada penjelasan yang diuraikan tersebut di atas, ada dua keterkaitan hubungan hukum yang berlangsung antara pihak rumah sakit dengan pihak pasien, yakni berbentuk layanan medis serta perjanjian

¹³ Noor M Aziz, 2010, *Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 37.

¹⁴ Veronica Komalawati, Op. Cit., hlm. 6.

perawatan yang berlangsung pada rumah sakit tersebut. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, layanan medis serta perjanjian perawatan ialah bahwa pihak rumah sakit ialah melaksanakan suatu tindakan, dengan demikian memperoleh kesembuhan pada pihak pasien, tindakan yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit tersebut ialah khususnya menyediakan layanan medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis yakni perawat dan juga dokter.

4. Hubungan Hukum Dokter dan Rumah Sakit

Terdapat pola hubungan kerja yang ada pada pihak dokter, secara umum yang ada di rumah sakit ialah hubungan tenaga kerja medis dan juga hubungan terapeutik, diantara ialah sebagaimana di bawah ini:¹⁵

a. Dokter sebagai *employee*

Berkenaan dengan pola hubungan terapeutik yang berlangsung antara pihak rumah sakit dan juga pihak pasien ialah bahwa tenaga medis yakni dokter merupakan seorang pekerja, berlangsung bilamana pihak pasien yang telah memiliki kompetensi yakni yang memiliki akal sehat dan juga sudah dewasa, sementara itu pihak rumah sakit hanya mempunyai tenaga medis yakni dokter yang berpredikat sebagai seorang pekerja. Dalam konteks semacam ini, kedudukan dari rumah sakit ialah sebagai pihak yang wajib menyediakan prestasi, sedangkan pihak dokter memiliki fungsi sebagai seorang pekerja (sub-kordinater dari rumah sakit) yang memiliki tugas

¹⁵ Nusye K. I. Jayanti, 2009, *Penyelesaian hukum dalam malapraktik kedokteran*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 13.

untuk melangsungkan proses kewajibannya di rumah sakit. Dalam bahasa yang lainnya, kedudukan yang ada pada rumah sakit ialah bahwa rumah sakit ialah badan yang berfungsi prinsipal, sedangkan kedudukan dari dokter ialah agen. Kedudukan dari pihak pasien ialah sebagai seorang pihak yang memiliki kewajiban menyediakan kontraprestasi. Hubungan hukum semacam ini pada umumnya juga berlaku untuk sarana kesehatan milik dari pemerintah, yakni dokter yang mendapatkan upah penuh dan tetap, tidak berdasarkan dengan banyak pasien yang sudah tertangani ataupun kualitas atau kuantitas tindakan medis yang dilaksanakannya.

b. Dokter sebagai *attending physician* (mitra)

Jalinan hubungan yang berlangsung antara pihak dokter dan pihak pasien ialah bahwa pihak dokter berpredikat sebagai *attending physician*, pola semacam ini berlangsung bilamana pasien telah dalam kondisi yang memiliki kompetensi yakni memiliki akal sehat dan juga dewasa serta dilaksanakan perawatan pada rumah sakit yang mana tenaga medis yakni dokter tersebut berpredikat bukan sebagai seorang pekerja namun sebagai seorang mitra (*attending physician*).¹⁶

Pola semacam ini membuat pihak rumah sakit dan juga pihak dokter ada pada tingkatan yang sama. Kedudukan dari pihak dokter ialah sebagai pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan prestasi, sementara itu fungsi yang diemban oleh rumah sakit ialah sekedar sebagai tempat yang

¹⁶ Ibid., hlm. 13

memberikan layanan fasilitas (perawat/bidan, sarana nonmedik dan medik, makan dan minum, dan juga penginapan). Konsep semacam ini ialah bahwa rumah sakit menyediakan layanan sewa fasilitas yang diperlukan oleh pihak dokter. Pola hubungan yang banyak diterapkan dalam rumah sakit swasta ialah bahwa pihak dokter memperoleh pendapatan didasarkan terhadap jumlah dari pasien, kualitas dan juga kuantitas layanan medis yang diberikan. Bilamana dalam kurun waktu sebulan tidak terdapat satupun pasien yang mendapatkan layanan rawat inap, dengan demikian pihak dokter tersebut tidak mendapatkan pendapatan apapun.¹⁷

c. Dokter sebagai *independent contractor*

Berkenaan dengan dokter yang memiliki peranan sebagai *independent contractor*, contohnya saat kita meninjau bahwa layanan operasi ialah tindakan medis yang membutuhkan kinerja tim yang memiliki beberapa keahlian tertentu, yang terdiri dari ahli anestesi dan juga operator. Tim itu bisa berbentuk tim tunggal yang diketuai oleh ahli bedah yang bertugas sebagai kapten kapal, serta dokter anestesi yang di dalam terdiri dari dua tim, yakni tim anestesi yang diantaranya terdapat perawat anestesi dan juga ahli anestesi, sedangkan tim operator ialah terdiri dari perawat, ahli bedah dan juga asisten, dengan catatan bahwa tiap anggota tim memiliki pemimpinnya sendiri-sendiri yang akan berperan sebagai kapten kapal. Tim anestesi dan juga dokter ahli anestesi bertindak dengan mandiri (tidak

¹⁷ Ibid., hlm. 14

sebagai sub-kordinateroperator), dengan demikian posisi dari dokter anestesi ataupun tim anestesi ialah sebagai hubungan *independentrcontractor*. Namun konsep *independenttcontracor* hanya dapat diimplementasikan bilamana kedudukan dari dokter ahli anestesi yang ada di rumah sakit tersebut ialah sebagai seorang *attending physician*.¹⁸

B. Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit

Jalinan hubungan antara pasien dengan pihak dokter ialah sifatnya paternalistik, yang mana pihak pasien akan mengikuti arahan yang dilaksanakan oleh pihak dokter dengan tanpa melaksanakan pelemparan pertanyaan. Dokter sekrang ini ialah sebagai rekan dari pasien, serta baik pihak dokter dan juga pihak pasien mempunyai kedudukan yang sejajar secara hukum. Seorang dokter dalam menyediakan layanan kesehatan pada pihak pasien yang berlangsung di rumah sakit. Secara umum bahwa rumah sakit, pasien dan dokter ialah sebagai subjek hukum dalam menyediakan layanan kesehatan yang tiapnya mempunyai kewajiban dan juga hak supaya terjalin layanan kesehatan yang sifatnya manusiawi serta perawatan yang dihasilkan atau diberikan juga bermutu.¹⁹

1. Hak dan Kewajiban Pasien

Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang

¹⁸ Ibid., hlm. 14.

¹⁹ Ta'adi, *Hukum Kesehatan*, 2012, "*Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat*", Yogyakarta, EGC, hlm. 23.

Praktik Kedokteran, Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No 44 tahun 2009 berkenaan dengan Rumah Sakit, bawah setiap pasien memiliki hak:

- a. Mendapatkan informasi berkenaan dengan peraturan dan juga tatap tertib yang ada pada rumah sakit tersebut.
- b. Mendapatkan informasi berkenaan dengan kewajiban dan hak yang didapatkan oleh pihak pasien.
- c. Mendapatkan pelayanan yang tanpa diskriminasi, jujur, adil serta manusiawi.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang memiliki kualitas baik berdasarkan pada standar prosedur operasional dan juga standar profesi.
- e. Mendapatkan pelayanan yang efisien dan efektif, dengan demikian pasien dapat mencegah peristiwa kerugian materi ataupun fisik.
- f. Dapat melaksanakan pengaduan atau pengajuan berkenaan dengan mutu dari layanan yang diterimanya

- g. Melaksanakan pemilihan kelar perawatan dan juga dokter yang berdasarkan pada keinginan serta aturan yang ada di rumah sakit tersebut.
- h. Berkonsultasi mengenai penyakit yang dialami pada dokter yang lainnya yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) baik itu di luar ataupun di dalam rumah sakit.
- i. Memperoleh jaminan rahasia berkenaan dengan jenis penyakit dan juga privasi yang ada pada pasien dan juga data data medis yang ada.
- j. memperoleh informasi yang mencakup tata cara untuk penanganan serta diagnosis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- k. Menyediakan penolakan atau persetujuan berkenaan dengan tindakan yang hendak dilaksanakan oleh tenaga kesehatan berkenaan dengan penyakit yang dialaminya
- l. Dilaksanakan pendampingan keluarga dari pasien bilamana dalam kondisi yang kritis
- m. Melaksanakan ibadah berdasarkan kepercayaan dan agama yang dipercayai selama tidak membuat pasien lain merasa terganggu
- n. Mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan selama proses berlangsungnya perawatan yang berlangsung di rumah sakit
- o. Melaksanakan pengajuan perbaikan, usul dan saran berkenaan dengan pelayanan yang disediakan oleh pihak rumah sakit pada pasien tersebut.

- p. Tidak mempersetujuan layanan bimbingan kerohanian yang tidak sejalan dengan kepercayaan dan juga agama yang diimaninya.
- q. Menuntut atau menggugat pihak rumah sakit bilamana pihak rumah sakit tersebut tidak menyediakan layanan yang berdasarkan pada standar yang ditetapkan baik pidana ataupun perdata
- r. Melakukan komplain terhadap layanan medis dari rumah sakit yang tidak sejalan dengan standar layanan baik media elektronik ataupun cetak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Merujuk pada Pasal 31 Undang-Undang No 44 tahun 2009 berkenaan dengan pihak Rumah Sakit, pada pihak pasien dalam mendapatkan layanan dari praktik kedokteran, memiliki kewajiban diantaranya ialah:

- a. Tiap pasien memiliki kewajiban pada pihak rumah sakit berkenaan dengan layanan kesehatan yang didapatkan.
- b. Ketetapan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban dari pihak pasien ditetapkan pada Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2014

mengenai Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, yang mengungkapkan bahwa:

- a) Patuh terhadap aturan yang ada pada rumah sakit tersebut.
- b) Mempergunakan layanan fasilitas yang tersedia di rumah sakit dengan penuh pertanggungjawaban.
- c) Menjaga hak yang dimiliki oleh pasien yang lainnya, petugas, tenaga medis serta pengunjung yang berkerja pada rumah sakit tersebut.
- d) Memberi informasi yang akurat, jujur dan juga lengkap berdasarkan pengetahuan serta kemampuan berkenaan dengan permasalahan medis
- e) Memberi informasi berkenaan dengan jaminan kesehatan dan juga kemampuan finansial yang ada
- f) Patuh terhadap rencana terapi yang disarankan oleh tenaga medis yang ada pada rumah sakit tersebut serta mendapat persetujuan dari pihak pasien sesudah memperoleh penjelasan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- g) Mendapatkan keseluruhan konsekuensi terhadap keputusan pribadi guna menyatakan penolakan terhadap rencana terapi yang disarankan oleh tenaga medis serta tidak patuh terhadap petunjuk yang disediakan oleh tenaga kesehatan dalam upaya untuk menyembuhkan penyakit ataupun permasalahan kesehatan yang lainnya.
- h) Memberi imbalan layanan jasa terhadap layanan yang diduplikatnya.

2. Hak dan Kewajiban Dokter

Merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 berkenaan dengan Praktik Kedokteran, menjelaskan bahwa dokter gigi ataupun dokter dalam melaksanakan praktik medis memiliki hak, diantaranya ialah:

- a. Mendapatkan lindungan hukum selama melakukan tugas berdasarkan pada standar prosedur operasional dan standar profesi.
- b. Menyediakan layanan medis berdasarkan pada standar prosedur operasional dan standar profesi.
- c. Mendapatkan informasi yang jujur dan juga lengkap berkenaan dengan keluarga pasien atau pasien itu sendiri.
- d. Mendapatkan imbalan jasa.

Sebagaimana dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran, mengemukakan bahwa pihak Dokter atau dokter gigi dalam melangsungkan proses praktik kedokteran memiliki beberapa kewajiban sebagaimana di bawah ini:

- a. Menyediakan layanan medis berdasarkan pada kebutuhan medis pasien, standar profesi dan juga standar prosedur operasional.
- b. Melaksanakan perujukan pasien kepada pihak dokter ataupun pihak dokter gigi yang lainnya yang memiliki kemampuan dan juga keahlian yang lebih bagus, bilamana tidak dapat melaksanakan pengobatan atau pemeriksaan tertentu.
- c. Menjaga kerahasiaan semua hal yang berkenaan dengan pasien, bahkan sesudah pasien tersebut meninggal.

- d. Melaksanakan penanganan darurat terhadap dasar perikemanusiaan, kecuali bilamana bahwa pasien tersebut merasa yakin bahwa terdapat orang yang lainnya yang mampu melaksanakannya.
- e. Meningkatkan wawasan ataupun ilmu pengetahuan serta melaksanakan pengembangan ilmu kedokteran dan juga kedokteran gigi.

3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang No 44 tahun 2009 berkenaan dengan Rumah Sakit, bahwa tiap rumah sakit memiliki hak sebagaimana di bawah ini:

- a. Melaksanakan penentuan kualifikasi, jumlah, dan jenis dari sumberdaya manusia berdasarkan pada klasifikasi dari rumah sakit tersebut.
- b. Mendapatkan imbalan layanan dan juga melaksanakan penentuan penghargaan, remunerasi, dan juga insentif berdasarkan pada ketentuan peraturanperundang-undangan.
- c. Melaksanakan proses kerjasama pada pihak yang lainnya dalam usaha untuk melaksanakan pengembangan layanan.
- d. Mendapatkan bantuan dari pihak yang lainnya yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan penggugatan pada pihak yang menyebabkan kerugian.
- f. Memperoleh lindungan hukum dalam melakukan layanan kesehatan.
- g. Melaksanakan promosi pelayanan kesehatan yang tersedia pada rumah sakit tersebut berdasarkan pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

- h. Memperoleh insentif pajak untuk rumah sakit dan juga rumah sakit public sebagaimana dipertetapkan sebagai suatu rumah sakit pendidikan.

Merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang No 44 tahun 2009 berkenaan dengan Rumah Sakit, bahwa tiap rumah sakit memiliki beberapa kewajiban sebagaimana di bawah ini:

- a. Menyediakan informasi yang tepat berkenaan dengan layanan dari rumah sakit pada pihak masyarakat.
- b. Menyediakan layanan kesehatan yang efektif, antidiskriminasi, bermutu, serta aman dengan memprioritaskan kepentingan yang ada pada standar layanan dari rumah sakit.
- c. Menyediakan layanan gawat darurat pada pihak pasien yang berdasarkan pada kapasitas dari layanan yang ada.
- d. Melaksanakan peran aktif untuk menyediakan layanan kesehatan terhadap bencana, berdasarkan pada kemampuan dari layanan yang ada.
- e. Memberikan pelayanan dan juga sarana pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial.
- f. Melaksanakan fungsi sosial, diantaranya ialah menyediakan fasilitas layanan pada pasien yang tidak memiliki kemampuan finansial, bakti sosial bagi misi kemanusiaan, kejadian luar biasa, pelayanan korban bencana, ambulan gratis, dan pelayanan gawat darurat tanpa uang muka.
- g. Menyusun, mengoperasikan dan melakukan penjagaan standar mutu dari layanan kesehatan yang ada di dalam suatu rumah sakit sebagai pedoman dalam menyediakan layanan pada pasien.

- h. Melaksanakan layanan rekam medis.
- i. Memberikan sarana dan juga prasarana umum yang sesuai, diantaranya ialah sarana untuk lanjut usia, anak-anak, wanita menyusui, orang cacat, ruang tunggu, parkir, dan juga sarana ibadah.
- j. Menyelenggarakan system rujukan.
- k. Melaksanakan penalaran terhadap keinginan pasien yang memiliki ketentang terhadap peraturan perundang-undangan, standar profesi dan juga etika.
- l. Menyediakan informasi yang jujur, benar dan juga jelas berkenaan dengan hak serta kewajiban yang ada pada pihak pasien.
- m. Melindungi dan juga menghormati hak-hak yang ada pada pasien.
- n. menjalankan etika yang berlaku pada rumah sakit tersebut.
- o. Mempunyai system dari penanggulangan bencana dan juga pencegahan kecelakaan.
- p. Menjalankan program dari pemerintah dalam bidang kesehatan baik secara nasional ataupun regional.
- q. Membuatkan daftar dari tenaga medis yang melaksanakan praktik kedokteran, kedokteran gigi dan juga tenaga kesehatan yang lainnya.
- r. Melaksanakan penyusunan dan penerapan aturan internal yang ada di rumah sakit (*hospital by laws*).
- s. Menjaga dan menyediakan bantuan hukum untuk seluruh petugas yang berkerja di rumah sakit dalam menjalankan tugas yang diembannya.
- t. Menerapkan keadaan dari rumah sakit sebagai suatu daerah yang tanpa asap

rokok.

C. Malpraktik Medis

Malpraktek medis didefinisikan sebagai istilah yang didengar dan juga dipergunakan oleh semua kalangan, khususnya untuk semua pihak yang terlibat dalam kesehatan, dalam masyarakat pada saat seorang individu tersebut merasa bahwa kerugian kesehatan ialah hasil dari konsekuensi dari pihak tenaga medis, khususnya dokter ataupun yang lainnya yang menyebabkan kecurigaan berlangsungnya proses yang diistilahkan dengan “malpraktik”, atau mendapat imbuhan kata “medis”, dengan demikian dikenal dengan "malpraktik medis".

Malpraktik atau *mal-practice* berasal dari kata “*mal*” yang berarti buruk. Sedang kata “*practice*” berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik “buruk” yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Dinyatakan buruk, sebab terjadi penyimpangan serta kesalahan daripada yang semestinya.

Definisi malpraktik di negara Indonesia telah populer oleh para tenaga medis, mulanya didefinisikan sebagai salah satu bentuk dari *medical malpractice*, yakni sebagai kelalaian medik atau *medical negligence*.²⁰ Malpraktek pada dasarnya didefinisikan sebagai praktik yang tidak berdasarkan pada standar profesi yang sudah ditentukan atau praktik yang buruk, dengan demikian terdapat beberapa jenis yang bisa didiferensiasikan terhadap ketetapan dari hukum yang tidak diindahkan. Praktik medis secara umum

²⁰ Veronica Komalawati, Op. Cit., hlm. 20

terbagi ke dalam tiga jenis malpraktik, diantaranya ialah mencangkup:²¹

1. Malpraktik Perdata (*Civil Malpractice*)

Malpraktik perdata yang berlangsung bilamana ada permasalahan yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya isi dari perjanjian yang dibuat yang ada dalam transaksi terapeutik oleh tenaga medis ataupun berlangsung perbuatan yang menyalahi hukum (*Onrechtmatigedaad*), dengan demikian menyebabkan kerugian tertentu pada pihak pasien. Berikut ini ialah isi dari perjanjian yang tidak terpenuhi, diantaranya ialah:³²

- a. Tidak melaksanakan apa yang sesuai pada kesepakatan wajib yang dilaksanakan.
- b. Melaksanakan apa yang merujuk pada kesepakatan wajib yang untuk dilaksanakan, namun terlambat untuk menjalankannya.
- c. Melaksanakan apa yang merujuk pada kesepakatan wajib yang untuk dilaksanakan, namun tidak secara utuh untuk melaksanakannya dan juga hasil yang ada.
- d. Melaksanakan apa yang merujuk pada kesepakatan wajib yang untuk tidak dilaksanakan.

Tindakan atau perbuatan yang menyalahi hukum seyogyanya sesuai

²¹ Riska Andi Fitrono, Budi Setyanto dan Rehnalemken Ginting, *Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal*, Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm. 90

berdasarkan berbagai persyaratan sebagaimana di bawah ini:²²

- a. Diharuskan untuk terdapat suatu tindakan atau perbuatan (baik itu berbuat ataupun tidak berbuat)
- b. Tindakan atau perbuatan itu menyalahi hukum yang ada (tidak tertulis ataupun tertulis).
- c. Terdapatnya suatu kerugian.
- d. Terdapatnya hubungan kausal atau sebab akibat yang terjadi antara perbuatan yang menyalahi hukum dengan kerugian yang dialami.
- e. Terdapatnya suatu kesalahan (*schuld*).

Ganti rugi atau penggantian kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, dengan demikian pihak pasien diharuskan untuk mampu membuktikan setidaknya empat unsur, sebagaimana di bawah ini:²³

- a. Terdapatnya sebuah kewajiban tertentu dari pihak tenaga kesehatan pada pihak pasien.
- b. Tenaga kesehatan sudah menyalahi standar layanan medis yang biasa digunakan.
- c. Pasien atau pihak penggugat tersebut sudah mengalami kerugian yang bisa diharapkan untuk digantikan kerugian.
- d. Kerugian tersebut secara faktual diakibatkan oleh tindakan ataupun perbuatan yang ada di bawah standar.

²² Ibid., hlm. 32.

²³ Ibid., hlm. 34.

Pihak penggugat atau pasien tidak diharuskan untuk memperbuktikan terdapatnya aktivitas kelalaian yang disebabkan oleh (tergugat) “*res ipsa loquitor*” yang memiliki makna bahwa fakta sudah menungkapkan.²⁴ Oleh karena itu, tenaga kesehatan diharuskan untuk membuktikan tidak terdapatnya suatu tindakan atau perbuatan kelalaian yang sudah diakibatkannya. Malpraktik perdata yang dijadikan ukuran atau acuan ialah tindakan atau perbuatan kelalaian yang sifatnya ringan (*culparlevis*).²⁵

Fungsi dasar dari hukum perdata ialah melaksanakan pengaturan terhadap dua kemungkinan yang bisa dipergunakan untuk menjadi dasar yuridis dari gugatan berkenaan dengan malpraktek medis sebagaimana di bawah ini:²⁶

- a. Gugatan yang berlandaskan terhadap terdapatnya wanprestasi pada sebuah kontrak yang ada pada wanprestasi berkenaan dengan layanan medis disebabkan oleh tindakan atau perbuatan seorang tenaga medis atau dokter yang berbentuk memberikan layanan perawatan yang tidak wajar sebagaimana dengan apa yang sudah dijanjikan. Perawatan yang tidak sesuai bisa berbentuk keteledoran atau ketidak hati-hatian yang ada pada pihak dokter, dengan demikian bertentangan dengan tujuan dari terapeutik.

Wanprestasi dalam pelayanan medis terjadi, bila memenuhi unsur:²⁷

²⁴ Erich Masinambow, *Kedudukan Doktrin Res Ipsa Loquitor dalam Hukum Pembuktian Perdata Dalam Kasus Malpraktik*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 5/Mei/2016, hlm. 89.

²⁵ Ibid., hlm. 89.

²⁶ Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, Malang, Bayumedia, hlm. 99.

²⁷ Ibid., hlm. 100

- a) Hubungan yang terjalin antara pihak pasien dengan pihak dokter berlandaskan pada kontrakterapeutik.
- b) Pihak tenaga medis atau dokter sudah menyediakan layanan kesehatan yang tidak wajar dan bertentangan pada tujuan dari kontrakterapeutik.
- c) Pihak pasien mengalami suatu keadaan kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan dari dokter, pasien tersebut tidak mengalami kesembuhan tidak serta merta dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan telah melaksanakan wanprestasi untuk dokter selama proses layanan medis yang dilaksanakan tersebut tidak bertentangan dengan standar profesi, sebab hubungan yang berlangsung antara pihak dokter dengan pihak pasien ialah bukan sebagai jalinan hubungan yang mempertentangkan hasil dari layanan medis, tetapi kewajiban dari pihak dokter guna menyediakan layanan medis seoptimal mungkin, yang mana dokter tidak dapat memberikan jaminan hasil akhir.

Tiap wanprestasi ada kandungan dari aspek yang sifatnya merugikan terhadap pihak yang lainnya. Unsur dari merugikan di sini ada kalimat, “menggantikan bunga, biaya atau kerugian”. Konsekuensi dari kerugian yang diderita oleh pasien ini menjadi sumber penilaian berkenaan dengan terdapat atau tidak terdapatnya praktik malpraktek medis. Sesudah ada bukti terdapatnya kerugian, lalu ditinjau berdasarkan wujud dari perlakuan atau tindakan medis yang

dilaksanakan oleh tenaga medis, yakni dokter. Wujud dari rugi sebagai konsekuensi dari wanprestasi berbentuk rugi materiil yang bisa dikalkulasikan terhadap nilai uang, khususnya biaya obat-obatan, biaya perawatan, serta biaya perjalanan dengan persyaratan rugi yang semestinya bisa diperbuktikan.

b. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).

Dasar hukum kedua untuk melakukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, walaupun di antara pihak-pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan harus dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.²⁸ Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan aktif maupun pasif yang dilakukan baik sengaja maupun kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, dengan kewajiban hukumnya sendiri dengan nilai-nilai kesusilaan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Mencakup pula syarat untuk menuntut ganti kerugian oleh perbuatan melawan hukum yakni harus ada perbuatan dan sifat melawan hukum. Jadi, pertanggungjawaban tindakan medis perdata akibat dari adanya gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kerugian jika dalam suatu tindakan medis terdapat suatu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis.

²⁸ Ibid., hlm. 100-101.

2. Malpraktik Pidana (*Criminal Malpractice*)

Malpraktik pidana berlangsung bilamana pihak pasien meninggal atau cacar sebagai konsekuensi dari tindakan atau perbuatan tenaga kesehatan atau dokter yang disebabkan oleh ketidakcermatan atau kelalaian dalam melaksanakan usaha untuk merawat pada pihak pasien yang mengalami kecacatan ataupun meninggal tersebut. Malpraktik pidana terdapat tiga bentuk, diantaranya ialah sebagaimana di bawah ini:²⁹

- a. Malpraktik pidana yang disebabkan oleh tindakan kesengajaan, contohnya ialah tidak melaksanakan pertolongan terhadap kasus darurat walaupun dipahami bahwa bilamana tidak terdapa orang lain yang dapat membantu dan juga tidak menyediakan surat keterangan yang benar serta permasalahan berkenaan dengan aborsi tanpa adanya insikasi medis.
- b. Malpraktik pidana yang disebabkan karena keteledoran, contohnya ialah melaksanakan tindakan atau perbuatan yang tidak berdasarkan pada standar profesi dan melaksanakan tindakan tanpa diikuti dengan persetujuan dari tindakan medis.
- c. Tindakan pidana yang disebabkan oleh kealpaan, contohnya ialah berlangsung kematian atau kecacatan yang dialami oleh pasien sebagai konsekuensi dari tindakan atau perbuatan dari kesalahan dari tenaga medis yang tidak hati-hati.

3. Malpraktik Administratif (*Administrative Malpractice*)

Malpraktik administratif berlangsung bilamana pihak dari tenaga

²⁹ Cecep Triwibowo, Op.Cit., hlm. 274.

kesehatan melaksanakan pelanggaran pada hukum dari administrasi negara yang ada, contohnya ialah melaksanakan praktek bidan yang tidak disertai dengan izin praktek ataupun lisensi, melaksanakan tindakan atau upaya yang tidak sejalan dengan izin ataupun lisensinya, melaksanakan praktik dengan mempergunakan lisensi atau izin yang telah kadaluarsa, serta melaksanakan praktik tanpa menyusun catatan medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (3) bahwa "dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dan pemerintah".³⁰

D. Rekam Medis

1. Pengertian Rekam Medis

Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan, yang diperbaharui dengan Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008, tentang Rekam Medis menyatakan rekam Medis

³⁰ Riska Andi Fitrono, Budi Setyanto dan Rehnalemken Ginting, Loc. Cit.

adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta.

Sedangkan menurut Huffman EK, 1992 rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk menemukani (mengidentifikasi) pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya

2. Tujuan Rekam Medis

Tujuan rekam Medis berdasarkan Hatta (1985) terdiri dari beberapa aspek yang diungkapkan sebagaimana di bawah ini:

1. Aspek Administrasi.

Berkas medis memiliki nilai administrasi sebab isi dari rekam medis tersebut berkenaan dengan tindakan atau perbuatan yang berlandaskan pada tanggung jawab dan juga wewenang sebagai paramedik atau tenaga medis dalam usaha untuk meraih layanan kesehatan yang baik.

2. Aspek Medis.

Berkas dari rekam medis memiliki nilai medis, sebab catatan dari rekam medis tersebut berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan perencanaan perawatan atau pengobatan yang wajib untk disediakan pada pihak pasien.

3. Aspek Hukum.

Berkas medis memiliki nilai hukum, hal ini disebabkan bahwa isi dari berkas medis tersebut berkenaan dengan permasalahan terdapatnya jaminan hukum dengan dasar keadilan dalam upaya guna melaksanakan penegakkan hukum dan juga penyediaan barang bukti untuk melaksanakan penegakkan keadilan.

4. Aspek keuangan.

Berkas media memiliki nilai uang, hal ini disebabkan bahwa isi dari berkas rekam medis tersebut berkenaan dengan informasi dan juga data yang bisa dipergunakan dalam melaksanakan perhitungan biaya untuk proses tindakan perawatan dan pengobatan.

5. Aspek penelitian.

Berkas rekam medis memiliki nilai penelitian, hal ini disebabkan bahwa rekam medis tersebut berkenaan dengan informasi dan data yang bisa digunakan untuk proses melaksanakan pengembangan dan penelitian yang menyangkut ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan.

6. Aspek pendidikan.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data/informasi tentang perkembangan/ kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan/referensi pengajaran di bidang profesi kesehatan.

Berkas rekam medis memiliki nilai pendidikan, hal ini disebabkan bahwa berkas dari rekam medis tersebut berkenaan dengan informasi dan

juga data mengenai kronologi perkembangan serta aktivitas layanan medis yang disediakan pada pihak pasien yang lainnya. Informasi dan data ini bisa digunakan sebagai referensi atau bahan ajar dalam bidang profesi kesehatan.

7. Aspek dokumentasi.

Berkas rekam medis memiliki nilai dokumentasi, hal ini disebabkan bahwa isi dari berkas rekam medis tersebut berkenaan dengan sumber ingatan yang wajib untuk didokumentasikan serta dipergunakan sebagai bahan untuk bertanggung jawab serta laporan dari sarana layanan kesehatan.

3. Fungsi Rekam Medis

Fungsi dari rekam medis sebagaimana diungkapkan sebagai landasan dari tujuan rekam medis yang disebutkan di atas ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Dasar untuk pengobatan dan pemeliharaan dari pasien;
2. Bahan untuk membuktikan pada perkara hukum;
3. Bahan guna melaksanakan kebutuhan pendisikan dan juga penelitian;
4. Dasar untuk melaksanakan pembayaran biaya layanan kesehatan; serta
5. Bahan guna mempersiapkan statistika kesehatan.

4. Manfaat Rekam Medis

Manfaat yang ada pada rekam medis seperti yang termaktub di dalam Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008, mengenai Rekam Medis ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Pengobatan. Rekam medis memiliki manfaat sebagai petunjuk dan juga dasar dalam melaksanakan penganalisisan dan juga perencanaan penyakit dan juga perencanaan tindakan medis, pengobatan serta perawatan medis yang semestinya dilaksanakan pada pihak pasien.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan. Membuatkan Rekam Medis untuk penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal.
3. Pendidikan dan Penelitian. Rekam medis didefinisikan sebagai catatan atau informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis, bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi.
4. Pembiayaan Berkas rekam medis bisa diperjadikan sebagai bahan dan juga petunjuk guna melaksanakan penetapan biaya untuk pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien
5. Statistik Kesehatan Rekam medis bisa dipergunakan sebagai bahan statistic kesehatan, terutama guna melaksanakan pembelajaran mengenai perkembangan kesehatan pada rakyat serta guna melaksanakan penentuan jumlah pasien untuk penyakit yang khusus tertentu.

6. Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan Etik Rekam medis didefinisikan sebagai alat bukti yang tertulis utama, dengan demikian manfaat untuk menyelesaikan permasalahan etik, hukum dan juga disiplin.

E. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata yaitu: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³¹

³¹ Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³²

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Merujuk pada definisi dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian dalam melaksanakan gugatan untuk perbuatan yang berlawanan dengan hukum wajib untuk dilaksanakan pemenuhan berkenaan dengan unsur-unsur perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan juga perbuatan itu menyebabkan suatu keadaan kerugian.³³ Akan tetapi semenjak tahun 1919, *hoge raad* Belanda dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* melaksanakan perluasan tafsiran dari perbuatan yang berlawanan terhadap hukum, dengan demikian perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak hanya sekedar sebatas terhadap perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang namun juga meliputi

³² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2017, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 81.

³³ Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 185

salah satu dari beberapa perbuatan sebagaimana berikut ini:³⁴

- a. Terdapatnya sebuah perbuatan, yakni sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dimulai dari perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku. Pada dasarnya diterima bahwa anggapan dengan perbuatan sebagaimana dalam permasalahan ini, baik melaksanakan tindakan atau perbuatan yang aktif ataupun tidak melaksanakan perbuatan apapun secara pasif, contohnya ialah tidak melaksanakan perbuatan meskipun dia memiliki kewajiban guna melaksanakan pertolongan, kewajiban mana yang muncul dari hukum yang ada (karena terdapat pula kewajiban yang muncul dari kontrak). Oleh sebab itu, perbuatan yang berlawanan dengan hukum tidak terdapat unsur kata sepakat atau persetujuan dan juga tidak terdapat pula unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang ada di dalam suatu kontrak.³⁵
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, didefinisikan sebagai sebuah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai berdasarkan pada hak subjektif dari orang yang lainnya ataupun yang berlawanan dengan kewajiban dari hukum yang ada pada pihak yang membuat yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang.
- c. Harus ada kesalahan, syarat dari kesalahan ini bisa dilaksanakan pengukuran dengan cara yang objektif, yakni dengan dilaksanakan

³⁴ Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 6.

³⁵ Ibid., hlm. 185.

pembuktian bahwa dalam situasi semacam itu, manusia yang normal bisa melakukan pendugaan kemungkinan untuk terjadinya suatu akibat serta kemungkinan tersebut dapat mencegah atau mengantisipasi manusia guna melaksanakan perbuatan ataupun tidak. Subjektif didefinisikan sebagai dengan membuktikan apakah pihak yang membuat tersebut berlandaskan pada keahlian yang dipunyai yang mampu melaksanakan pendugaan terhadap akibat dari perbuatan tersebut.

Tidak hanya itu, terdapat orang lain yang melaksanakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diwajibkan untuk mampu melaksanakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilaksanakannya tersebut, sebab orang tersebut tidak mengetahui apa yang orang tersebut laksanakan tidak wajib untuk melaksanakan ganti rugi. Berkenaan dengan kesalahan semacam ini, ada duarkemungkinan:³⁶

- 1) Pihak yang mendapatkan kerugian juga memiliki kesalahan berkenaan dengan munculnya kerugian. Dalam definisi semacam ini bahwa bilamana orang yang mendapatkan kerugian juga melaksanakan kesalahan terhadap munculnya derita kerugian, dengan demikian sebagai dari kerugian ini dilaksanakan pembebanan padanya kecualikalau perbuatan yang berlawanan dengan hukum tersebut dilaksanakan secara sengaja.
- 2) Kerugian yang disebabkan oleh berbagai pelaku. Bilamana kerugian

³⁶ Ibid., hlm. 186.

tersebut disebabkan oleh perbuatan dari berbagai orang, dengan demikian tiap pihak atau orang tersebut harus menanggung tanggung jawab terhadap berlangsungnya perbuatan semacam itu bisa secara keseluruhan dituntut.

d. Harus terdapat jumlah kerugian yang disebabkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum berbentuk.³⁷

- 1) Kerugian materiil, yang mana bahwa kerugian materiil bisa tersusun atas kerugian yang jelas dialami oleh yang menderita serta keuntungan yang seyogyanya didapatkan. Dengan demikian pada dasarnya diterima bahwa yang menimbulkan tindakan berlawanan dengan hukum wajib untuk membayar kerugian dialami oleh yang menderita serta keuntungan yang seyogyanya didapatkan.
- 2) Kerugian idiil, yang mana perbuatan atau tindakan yang berlawanan dengan hukum tersebut bisa menyebabkan kerugian yang sifatnya idiil, misalnya ialah kehilangan rasa kesenangan dalam menjalani kehidupan, ketakutan ataupun sakit.

Cara guna melaksanakan penentuan besaran kerugian yang wajib untuk diganti biasanya dilaksanakan dengan cara melaksanakan penilaian terhadap kerugian itu, dengan demikian pada dasarnya yang pihak yang menanggung kerugian setidaknya diletakkan dalam situasi seperti situasi tersebut, pihak yang menerima kerugian tersebut

³⁷ Ibid., hlm. 186.

memiliki hak untuk melaksanakan penuntutan ganti rugi yang tidak sekedar kerugian yang sudah dideritanya pada saat melaksanakan pengajuan tuntutan namun juga apa yang akan diderita untuk waktu di masa depan.

- e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu *condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat) dan *adequate veroorzaking*.³⁸ dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.³⁹ Terdapat hubungan causal jika terdapat kerugian menurut aturan, maka secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum

³⁸ Ibid, hlm. 186.

³⁹ Ibid, hlm. 187.

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.⁴⁰ Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

F. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁴¹ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-

⁴⁰ Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijk heid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 13.

⁴¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hal. 48.

nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴²

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis⁴³ seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

⁴² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

⁴³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 83.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁴⁴ Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.⁴⁵ Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Menurut Muhammad Nasir, putusan hakim merupakan sebagai suatu pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet III, (Yogyakarta; Liberty, 1981), hal. 158

⁴⁵ Mertokusumo, *op. cit*

bersengketa.⁴⁶

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁴⁷ Sedangkan menurut Riduan Syahrani, lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁴⁸

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang

⁴⁶ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, cet. II, (Jakarta; Djambatan, 2005), hal. 187

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata; Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal 204.

⁴⁸ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Pustaka Kartini, 1988), hlm. 5.

bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

2. Asas Putusan Hakim

Asas-asas dalam putusan hakim dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat.

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus

sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.⁴⁹

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*).

4) Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 800.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Sebab meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatief*)⁵⁰, sehingga tidak dapat dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974.

Adapun yang perlu diperhatikan kemudian dalam prinsip keterbukaan ini adalah tempat ditegakkannya prinsip ini. Berdasarkan S.E.M.A. yang sama, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan ini harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan di ruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan, seperti ruang

⁵⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 61 atau Pandu, *op. cit.*, hal. 88.

kerja hakim atau ruang administrasi,⁵¹ karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan Pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.



⁵¹ Harahap, *op. cit.*, hal. 805.